Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 12
Palagiarism Check 02/234/67/78

Realitas Keragaman dan Kehidupan Sosial-Keagamaan Masyarakat Indonesia

Rikza Roshidatulailiyah[1], Habibi Suarman[2], Nur Qodriyatis Shofaa[3]
UIN Raden Fatah Palembang
rosidatulrikza@gmail.com[1], habibisuer@gmail.com[2], nurqodriyatisshofaa@gmail.com[3],

ABSTRAK

Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman ini merupakan kekayaan sosial, tetapi juga menuntut pengelolaan yang bijak agar tidak berkembang menjadi prasangka, diskriminasi, dan konflik. Artikel ini bertujuan menggambarkan realitas keragaman serta kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia dan menjelaskan peran pendidikan multikultural dan moderasi beragama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*) terhadap jurnal ilmiah nasional, dokumen resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang sebagian besar terbit pada 2022–2026. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, pengelompokan tema, dan penarikan simpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) keragaman Indonesia bersifat nyata dan berlapis; (2) toleransi dan gotong royong menjadi modal kerukunan, meskipun stereotip, diskriminasi, dan intoleransi masih menjadi tantangan; (3) pendidikan multikultural menanamkan sikap saling menghargai melalui peran guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat; (4) moderasi beragama dengan empat indikatornya sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural; dan (5) keharmonisan sosial-keagamaan memerlukan kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat. Pendidikan multikultural dan moderasi beragama perlu dipandang sebagai kebutuhan bersama dalam menjaga kerukunan bangsa.

Kata kunci: *keragaman; pendidikan multikultural; moderasi beragama; toleransi; kerukunan*

ABSTRACK

Indonesia is a pluralistic society consisting of diverse ethnic groups, religions, languages, and cultures. This diversity is a social asset, but it also requires wise management to prevent prejudice, discrimination, and conflict. This article aims to describe the reality of diversity and the socio-religious life of Indonesian society, as well as to explain the role of multicultural education and religious moderation in building a harmonious society. This study employs a library research method by examining national scientific journals, official documents from the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, and relevant laws and regulations, most of which were published between 2022 and 2026. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach through data reduction, thematic categorization, and conclusion drawing. The findings

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

indicate that: (1) Indonesia's diversity is real and multidimensional; (2) tolerance and mutual cooperation serve as the foundation for social harmony, although stereotypes, discrimination, and intolerance remain challenges; (3) multicultural education fosters mutual respect through the roles of teachers, schools, families, and communities; (4) religious moderation, with its four indicators, aligns with the objectives of multicultural education; and (5) socio-religious harmony requires cooperation among the government, educational institutions, religious leaders, and society. Multicultural education and religious moderation should be regarded as a shared responsibility in maintaining national harmony.
***Keywords**: diversity; multicultural education; religious moderation; tolerance; social harmony.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi. Selain enam agama yang banyak dianut masyarakat, di Indonesia terdapat ratusan hingga ribuan suku, bahasa daerah, aksara, dan tradisi lokal (Khoerunisa & Yuliani, 2024). Dari sisi bahasa saja, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengidentifikasi dan memvalidasi 718 bahasa daerah dan 778 dialek. Keragaman ini menjadi ciri khas bangsa yang diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal sekaligus kenyataan sehari-hari yang kita jumpai di lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan kampus.

Keragaman dapat menjadi kekuatan, tetapi dapat pula menimbulkan persoalan bila tidak dikelola dengan baik. (Mukhibat et al., 2023) menjelaskan bahwa keragaman suku, budaya, dan agama berpotensi memunculkan konflik antarkelompok. Konflik sosial di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan identitas etnis dan agama, tetapi juga oleh ketidakadilan struktural dan kesenjangan ekonomi. Karena itu, menjaga kerukunan tidak cukup dilakukan lewat imbauan moral; ia membutuhkan pendidikan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat.

Potret kerukunan umat beragama menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Survei Kementerian Agama mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) nasional naik dari 76,02 pada 2023 menjadi 76,47 pada 2024 (RI, 2024), kemudian mencapai 77,89 pada 2025, yakni angka tertinggi sejak survei 2015 (Buddha, 2025). Namun, hasil survei yang sama menunjukkan bahwa aspek kebersamaan, khususnya partisipasi lintas komunitas dalam kehidupan sosial, masih perlu diperkuat.

Pemerintah menjawab kebutuhan ini antara lain melalui penguatan moderasi beragama. Program tersebut dijalankan Kementerian Agama sejak 2016 dan kini memiliki landasan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Di dunia pendidikan, gagasan ini beriringan dengan pendidikan multikultural, yaitu pendidikan yang mengajak peserta didik memahami dan menerima perbedaan (Maunah et al., 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas pendidikan multikultural dan moderasi beragama secara terpisah. Padahal, mahasiswa perlu memahami keduanya sebagai satu rangkaian yang saling menguatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana realitas keragaman serta kehidupan sosial dan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia; (2) bagaimana pendidikan multikultural dan moderasi beragama dipahami serta saling berhubungan; dan (3) upaya apa yang dapat dilakukan untuk membangun kehidupan sosial-keagamaan yang harmonis. Artikel ini bertujuan memberi gambaran yang utuh, objektif, dan mudah dipahami, tanpa menyudutkan kelompok agama, suku, maupun budaya tertentu.

.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena tujuan artikel adalah mengkaji dan menyintesis temuan yang telah dipublikasikan, bukan mengumpulkan data lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah teori dan hasil penelitian dalam buku, jurnal, dan dokumen resmi (Hakim & Darojat, 2023).

Sumber literatur

Sumber literatur terdiri atas tiga kelompok. Pertama, artikel jurnal ilmiah Indonesia tentang keragaman, pendidikan multikultural, dan moderasi beragama. Kedua, dokumen dan publikasi resmi pemerintah, yaitu buku dan berita resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan dari basis data JDIH BPK, serta pemberitaan resmi tentang data kebahasaan Kemendikbudristek. Ketiga, satu buku rujukan teori pendidikan multikultural (Banks, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Keragaman Masyarakat Indonesia

Keragaman Indonesia bersifat berlapis. Pertama, keragaman suku dan budaya. menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang hampir tidak tertandingi di dunia. Setiap kelompok memiliki adat dan cara hidup yang khas. Di antaranya terdapat kearifan lokal seperti *Dalihan na tolu* yang, berperan dalam membina interaksi sosial dan solidaritas, termasuk antarumat beragama.

Kedua, keragaman bahasa. Hasil pemetaan Kemendikbudristek mencatat 718 bahasa daerah, 778 dialek, dan 43 subdialek dari 2.560 daerah pengamatan. Di sisi lain, 11 bahasa daerah dilaporkan telah punah, antara lain karena berkurangnya penutur yang memakai bahasa daerah di keluarga dan lingkungan, migrasi, perkawinan campur, serta pengaruh modernisasi (ANTARA, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa keragaman tidak otomatis lestari; ia perlu dirawat.

Ketiga, keragaman agama, etnis, dan ras. Multikulturalisme menuntut masyarakat bukan hanya mengakui, tetapi juga menerima perbedaan etnis, ras, dan agama agar dapat hidup berdampingan dengan baik. Bagi banyak orang Indonesia, keragaman dipandang sebagai anugerah (Khoerunisa & Yuliani, 2025). Pandangan serupa tercermin dalam pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 yang menyebut keragaman agama dan keyakinan sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia (Republik Indonesia, 2023). Ringkasan dimensi keragaman, manfaat, dan tantangannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dimensi keragaman masyarakat Indonesia, manfaat, dan tantangannya

Dimensi	Gambaran	Manfaat	Tantangan
Suku dan budaya	Ratusan hingga ribuan suku, aksara, dan tradisi lokal (Khoerunisa & Yuliani, 2025)	Kearifan lokal, misalnya *Dalihan na tolu*, menopang solidaritas (Nofrianti et al., 2024)	Potensi konflik antarkelompok bila perbedaan tidak dikelola (Mukhibat et al., 2023)
Agama	Enam agama yang banyak dianut (Khoerunisa & Yuliani, 2025)	Ruang dialog dan kerja sama lintas agama (Mahmudah & Aminah, 2024)	Intoleransi dan polarisasi keagamaan (Khoerunisa & Yuliani, 2024)

.

Dimensi	Gambaran	Manfaat	Tantangan
Bahasa	718 bahasa daerah dan 778 dialek (ANTARA, 2024)	Sarana pewarisan budaya kepada generasi berikutnya (ANTARA, 2024)	11 bahasa daerah dilaporkan punah (ANTARA, 2024)
Adat dan tradisi	Agama hidup berdampingan dengan budaya (Mukhibat et al., 2023)	Sikap akomodatif terhadap budaya lokal menjadi indikator moderasi (Kementerian Agama RI, 2019)	Menjaga agar akomodasi budaya tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama (Kementerian Agama RI, 2019)

Sumber: sintesis penulis dari literatur yang dicantumkan pada tabel.

Manfaat keragaman terlihat pada tiga hal. Pertama, kekayaan budaya dan identitas yang memperluas pengalaman hidup bersama. Kedua, modal sosial berupa gotong royong dan nilai lokal yang menopang kohesi (Fauziah et al., 2026; Nofrianti et al., 2024). Ketiga, kesempatan belajar lintas budaya; di lingkungan pesantren yang beragam, misalnya, santri dapat saling belajar dan menghargai budaya lain (Maunah et al., 2024).

Tantangannya juga nyata. Selain potensi konflik antarkelompok (Mukhibat et al., 2023), terdapat kesenjangan ekonomi yang tercermin pada rasio Gini 0,388 pada Maret 2023 dan dinilai turut memicu ketegangan sosial (Nofrianti et al., 2024). Globalisasi juga dapat melemahkan akar budaya dan identitas nasional jika tidak diimbangi pendidikan yang kuat. Terakhir, ancaman kepunahan bahasa daerah mengingatkan kita bahwa merawat keragaman adalah tugas bersama .

B. Kehidupan Sosial dalam Keragaman

Interaksi sosial dan toleransi

Interaksi antarwarga dari latar belakang berbeda terjadi setiap hari, misalnya di lingkungan tetangga, sekolah, dan tempat kerja. Salah satu ukuran yang tersedia adalah IKUB yang disusun Kementerian Agama melalui survei.

Gotong royong dan solidaritas

Gotong royong adalah salah satu perekat sosial yang paling dikenal. Gotong royong bukan sekadar kerja bersama, melainkan mekanisme sosial bermuatan nilai yang menanamkan solidaritas, keseimbangan, dan tanggung jawab kolektif. Praktik ini memperkuat kohesi sosial dan membantu meredam potensi konflik di lingkungan multikultural. Nilai lokal seperti *Dalihan na tolu* juga terbukti memainkan peran serupa dalam menjaga solidaritas antarumat beragama (Nofrianti et al., 2024).

Stereotip, diskriminasi, intoleransi, dan konflik

Di samping sisi positif tersebut, kehidupan sosial yang beragam juga menghadapi persoalan. Stereotip adalah anggapan yang disamaratakan terhadap suatu kelompok. Bila berlanjut menjadi perlakuan yang tidak adil, ia disebut diskriminasi; bila berupa penolakan terhadap perbedaan, ia disebut intoleransi; dan bila ketegangan tidak dikelola, ia dapat berkembang menjadi konflik.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penyebab konflik bersifat berlapis. Ketidakadilan struktural dan ketidaksetaraan ekonomi merupakan penyebab utama konflik sosial di Indonesia, sementara perbedaan identitas etnis dan agama ikut berkontribusi. Artinya, perbedaan bukan penyebab tunggal; ia lebih mudah dipersoalkan ketika bertemu dengan masalah keadilan dan kepentingan intoleransi dan polarisasi keagamaan sebagai gejala yang perlu ditangani, dan menegaskan bahwa tanpa nilai moderasi keragaman justru dapat menjadi sumber konflik. Pentingnya sikap tidak mendiskriminasi berdasarkan etnis, kelas

sosial, dan gender. Pemahaman ini penting agar kita tidak menyalahkan kelompok tertentu, melainkan memperbaiki cara kita mengelola perbedaan.

C. Kehidupan Sosial-Keagamaan Masyarakat Indonesia

Keragaman agama di Indonesia berjalan dalam kerangka negara yang menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya (Mukhibat et al., 2023). Dalam praktiknya, hubungan antarumat beragama tampak pada kehidupan bertetangga, kegiatan sosial bersama, dan forum-forum dialog. Toleransi menjadi kunci hubungan tersebut, yaitu sikap menghormati perbedaan, memberi ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan, dan bersedia bekerja sama (RI, 2019).

Kerja sama lintas agama dapat dilihat, misalnya, dalam peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kota Kediri berperan penting menjaga kerukunan dengan menggandeng unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan organisasi kemasyarakatan. FKUB juga membangun kampung moderasi beragama serta melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan seminar tentang bahaya sikap intoleran dan paham radikal. Selain itu, antarumat beragama di tingkat komunitas dan kegiatan sosial-ekonomi lintas budaya dan agama yang melibatkan generasi muda.

Meski demikian, terdapat beberapa tantangan. Pertama, polarisasi dan intoleransi keagamaan (Khoerunisa & Yuliani, 2024). Kedua, kebersamaan lintas komunitas yang masih perlu diperkuat. Ketiga, fanatisme golongan yang bersumber dari cara menafsirkan teks agama dan dapat memicu konflik (Mukhibat et al., 2023). Perlu ditegaskan bahwa tantangan ini tidak melekat pada satu agama tertentu. Ekstremisme dan fundamentalisme mengancam berbagai agama, bukan satu agama saja. Karena itu, penyelesaiannya pun memerlukan kerja sama seluruh umat beragama.

D. Pendidikan Multikultural

Pengertian dan tujuan

Pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai pendidikan yang menanamkan pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan agama, budaya, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan usia (Maunah et al., 2024). (Sipuan et al., 2022) memandangnya sebagai tanggapan atas semakin beragamnya peserta didik di sekolah sekaligus tuntutan agar setiap kelompok memperoleh hak yang setara. Dengan kata lain, pendidikan multikultural tidak berhenti pada mengenalkan budaya lain, tetapi juga membangun sikap adil dan inklusif.

Tujuannya mencakup (a) menumbuhkan toleransi dan sikap saling menghargai; (b) mencegah konflik yang bersumber dari perbedaan etnis, budaya, dan agama serta (c) membentuk karakter dan identitas nasional di tengah tantangan globalisasi (Hakim & Darojat, 2023).

Manfaat

Astiti et al. (2026), melalui tinjauan sistematis, menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural berkontribusi pada berkembangnya toleransi, inklusivitas, dan sikap saling menghormati antarumat beragama. Maunah et al. (2024) menemukan bahwa pendidikan multikultural di pesantren membantu santri menghadapi globalisasi, saling belajar, dan menghargai budaya lain. Adapun (Qomaruddin et al., 2026) memandangnya sebagai upaya pencegahan konflik sosial sekaligus fondasi keharmonisan bangsa.

Peran guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat

Pendidikan multikultural tidak dapat berjalan hanya di ruang kelas. Peran masing-masing pihak dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Peran guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pendidikan multikultural

Pihak	Peran utama	Sumber
Guru	Menanamkan nilai kehidupan yang membentuk karakter berjati diri bangsa; menerapkan pembelajaran interaktif-humanis; memiliki pemahaman yang memadai tentang perspektif multikultural	Sipuan et al. (2022); Qomaruddin et al. (2026); Astiti et al. (2026)
Sekolah	Membangun paradigma keragaman yang inklusif, menghargai keragaman bahasa, membangun sikap peka gender, serta pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan; mengintegrasikan nilai multikultural pada PPKn dan Pendidikan Agama Islam; menciptakan budaya sekolah yang inklusif	Sipuan et al. (2022); Qomaruddin et al. (2026)
Keluarga	Bekerja sama dengan sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah terhadap perbedaan agama dan membantu anak menjadi toleran serta berkarakter baik	Wahid (2024)
Masyarakat	Menyediakan lingkungan sosial yang mendukung, bersinergi dengan pembuat kebijakan dan pendidik, serta menjalankan pendekatan dari bawah melalui kegiatan komunitas	Qomaruddin et al. (2026); Astiti et al. (2026); Khoerunisa & Yuliani (2024)

Sumber: sintesis penulis dari literatur yang dicantumkan pada tabel.

Peran-peran tersebut saling bergantung. Guru membutuhkan dukungan kurikulum sekolah, sekolah membutuhkan dukungan keluarga, dan keduanya membutuhkan lingkungan masyarakat yang sejalan. Tantangan yang masih dijumpai antara lain terbatasnya pemahaman pendidik, dukungan kurikulum yang belum memadai, dan dukungan lingkungan sosial yang belum kuat (Astiti et al., 2026), serta keterbatasan kompetensi pedagogis guru dan kurangnya materi ajar yang representatif (Qomaruddin et al., 2026).

E. Moderasi Beragama

Pengertian

Kementerian Agama RI (2019) mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Istilah ini berkaitan dengan konsep *wasathiyah* yang secara harfiah berarti "tengah" atau "pertengahan" (RI, 2019). Mukhibat et al. (2023) menegaskan bahwa yang dimoderasi bukanlah agamanya, melainkan cara memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, moderasi beragama tidak berarti melemahkan keyakinan atau mencampuradukkan ajaran.

Moderasi beragama telah menjadi kebijakan nasional. Kementerian Agama menjalankan programnya sejak 2016 dan menetapkan 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 kemudian menjadi pedoman bagi

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama, dengan pedoman umum yang memuat indikator, esensi, ekosistem dan kelompok strategis, arah kebijakan dan strategi, serta program penguatan moderasi beragama. Peraturan ini menegaskan moderasi beragama sebagai modal dasar bagi keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara (Republik Indonesia, 2023).

Prinsip dan indikator

Kementerian Agama RI (2019) menetapkan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Makna dan contoh penerapannya diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3. Empat indikator moderasi beragama dan contoh penerapannya

Indikator	Makna	Contoh penerapan*
Komitmen kebangsaan	Menerima prinsip berbangsa yang tertuang dalam UUD 1945 dan regulasi di bawahnya, termasuk Pancasila sebagai dasar negara	Menaati hukum, menghormati simbol negara, dan mengutamakan persatuan
Toleransi	Menghormati perbedaan, memberi ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan, tidak mengganggu praktik keyakinan orang lain, dan bersedia bekerja sama	Menjaga ketenangan saat teman berbeda agama beribadah; bekerja sama dalam kegiatan sosial
Anti-kekerasan	Menolak tindakan yang menggunakan cara kekerasan, baik fisik maupun verbal	Menyelesaikan perbedaan lewat dialog dan tidak menyebarkan ujaran kebencian
Akomodatif terhadap budaya lokal	Ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama	Ikut serta dalam kerja bakti atau kegiatan adat yang bersifat sosial tanpa mencampuradukkan ajaran

Sumber makna: Kementerian Agama RI (2019) dan Mukhibat et al. (2023). *Contoh penerapan merupakan ilustrasi penulis.

Keempat indikator tersebut saling melengkapi. Komitmen kebangsaan berarti bersedia menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi serta menerima Pancasila sebagai dasar negara. Toleransi berarti memberi ruang dan tidak mengganggu praktik keyakinan umat lain, sekaligus ikut merawat keragaman. Sikap toleran ini membawa umat beragama pada penolakan terhadap kekerasan dan tindakan radikal. Terakhir, sikap akomodatif terhadap budaya lokal dilandasi kesadaran bahwa agama tidak hadir dari ruang hampa, melainkan berbaur dengan budaya (Mukhibat et al., 2023).

Penerapan

Penerapan moderasi beragama dapat dilakukan di lembaga pendidikan dan masyarakat. Di bidang pendidikan, Mukhibat et al. (2023) menunjukkan bahwa penguatan sistem pendidikan dengan sudut pandang moderasi mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, serta pendidikan bagi tenaga pendidik. Di perguruan tinggi, kebijakan ini diwujudkan antara lain melalui Rumah Moderasi Beragama, sedangkan di sekolah dapat dibentuk klub moderasi serta kegiatan dialog antarumat beragama. Di

masyarakat, penerapan dapat berbentuk kampung moderasi beragama dan kegiatan penyuluhan yang dijalankan FKUB (Mahmudah & Aminah, 2024).

Keberhasilan pendidikan moderasi beragama juga perlu diukur. Mukhibat et al. (2023) menyebutkan beberapa cara evaluasi, yaitu pengamatan langsung oleh guru terhadap sikap peserta didik, tes dan penilaian, kuesioner atau survei, serta diskusi kelompok. Dengan evaluasi yang baik, lembaga pendidikan dapat memperbaiki mutu pembelajaran dan melihat apakah nilai toleransi benar-benar tampak dalam perilaku sehari-hari, bukan hanya dalam pengetahuan.

F. Hubungan Pendidikan Multikultural dengan Moderasi Beragama

Pendidikan multikultural dan moderasi beragama memiliki tujuan yang beririsan, yaitu membangun masyarakat yang saling menghargai. (Wahid, 2024) menyimpulkan bahwa moderasi beragama memegang peran penting dalam penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, dan keberhasilannya memerlukan kerja sama orang tua, peserta didik, serta lembaga pendidikan. Astiti et al. (2026) menemukan bahwa memasukkan nilai multikultural ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran mendorong peserta didik memiliki cara pandang keagamaan yang moderat dan inklusif. Temuan serupa muncul di pesantren, tempat pendidikan multikultural dipakai untuk menumbuhkan sikap moderat dan menghargai budaya lain (Maunah et al., 2024).

Hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan kerangka lima dimensi pendidikan multikultural, yaitu integrasi konten, konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi kesetaraan (*equity pedagogy*), dan budaya sekolah yang memberdayakan. Tabel 4 memetakan kelima dimensi itu dengan indikator moderasi beragama.

Tabel 4. Keterkaitan dimensi pendidikan multikultural dengan indikator moderasi beragama

Dimensi pendidikan multikultural (Banks, 2019)	Contoh wujud di sekolah atau kampus	Indikator moderasi beragama yang diperkuat
Integrasi konten	Contoh dan bahan ajar memuat beragam budaya dan tradisi	Akomodatif terhadap budaya lokal
Konstruksi pengetahuan	Peserta didik dilatih menyadari adanya beragam sudut pandang dan tafsir	Toleransi
Pengurangan prasangka	Interaksi dan kerja sama lintas latar belakang	Toleransi dan anti-kekerasan
Pedagogi kesetaraan	Pembelajaran yang memberi kesempatan setara bagi semua peserta didik	Toleransi dan sikap adil
Budaya sekolah yang memberdayakan	Aturan dan kegiatan sekolah yang inklusif serta menumbuhkan kebersamaan	Komitmen kebangsaan

Sumber: pemetaan penulis (sintesis) berdasarkan Banks (2019) dan Kementerian Agama RI (2019).

Perlu dicatat bahwa cakupan keduanya tidak identik. Pendidikan multikultural mencakup perbedaan agama, budaya, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan usia (Maunah et al., 2024), sedangkan moderasi beragama berfokus pada cara beragama. Karena

itu, keduanya lebih tepat dipandang saling melengkapi. Mukhibat et al. (2023) menyebut lembaga pendidikan sebagai wadah tumbuhnya pemikiran kebangsaan dan penanaman nilai multikulturalisme sekaligus pemaknaan agama yang membawa perdamaian. Pendidikan multikultural menyediakan "ruang belajar" tentang perbedaan, sementara moderasi beragama memberi arah sikap keagamaan yang adil, seimbang, dan tidak ekstrem di dalam ruang tersebut.

G. Upaya Membangun Kehidupan Sosial-Keagamaan yang Harmonis

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat lima upaya yang dapat ditempuh secara bersamaan.

1. Menguatkan kurikulum dan budaya sekolah. Nilai multikultural dan moderasi beragama diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti PPKn dan Pendidikan Agama, dikombinasikan dengan pembelajaran interaktif-humanis dan budaya sekolah yang inklusif (Qomaruddin et al., 2026). Khoerunisa dan Yuliani (2024) juga merekomendasikan integrasi moderasi beragama ke dalam kurikulum nasional.
2. Meningkatkan kapasitas pendidik. Karena terbatasnya pemahaman dan kompetensi pedagogis guru menjadi hambatan (Astiti et al., 2026; Qomaruddin et al., 2026), pelatihan tentang perspektif multikultural dan penyediaan materi ajar yang representatif perlu diprioritaskan.
3. Memperluas dialog dan kerja sama lintas agama. Peran FKUB, kampung moderasi beragama, serta kegiatan sosial-ekonomi lintas budaya dan agama perlu diperkuat dan melibatkan generasi muda (Khoerunisa & Yuliani, 2024; Mahmudah & Aminah, 2024). Langkah ini sekaligus menjawab kebutuhan penguatan kebersamaan lintas komunitas (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, 2025).
4. Menghidupkan gotong royong, kearifan lokal, dan bahasa daerah. Gotong royong dan nilai lokal terbukti menopang solidaritas dan kohesi (Fauziah et al., 2026; Nofrianti et al., 2024). Upaya revitalisasi bahasa daerah juga penting agar warisan budaya tidak hilang (ANTARA, 2024).
5. Memperkuat kebijakan dan keadilan sosial. Perpres 58/2023 menyediakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama (Republik Indonesia, 2023). Karena ketidakadilan struktural dan kesenjangan ekonomi turut memicu konflik, kebijakan publik perlu diarahkan pada distribusi sumber daya yang adil (Nofrianti et al., 2024).

Upaya-upaya tersebut perlu dijalankan dengan cermat. Mukhibat et al. (2023) mengingatkan bahwa moderasi beragama yang disosialisasikan tanpa pemikiran yang matang dapat menimbulkan ketidakselarasan antarkomponen masyarakat, sehingga pelaksanaannya perlu terus dicermati dan dievaluasi. Selain itu, sebagaimana ditunjukkan pada bagian B dan C, konflik tidak semata-mata bersumber dari perbedaan agama atau budaya. Pendidikan dan dialog perlu berjalan bersama dengan perbaikan keadilan sosial agar hasilnya berkelanjutan.

Mukhibat et al. (2023) menggambarkan hal ini sebagai ekosistem moderasi beragama, yaitu keadilan dan kesetaraan, toleransi, komunikasi yang baik, pendidikan yang inklusif, kepemimpinan yang moderat, dan kerja sama antarlembaga. Artinya, tidak ada satu pihak yang dapat bekerja sendiri. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dapat berperan dengan memulai dari hal sederhana: mengenal teman yang berbeda latar belakang, tidak menyebarkan prasangka, dan ikut dalam kegiatan bersama yang melibatkan berbagai kelompok.

KESIMPULAN

Kajian pustaka ini menyimpulkan lima hal. Pertama, masyarakat Indonesia hidup dalam keragaman suku, agama, ras, bahasa, budaya, dan adat yang berlapis; keragaman ini memberi

manfaat berupa kekayaan budaya dan modal sosial, tetapi juga menuntut pengelolaan agar tidak menimbulkan konflik. Kedua, kehidupan sosial ditopang oleh interaksi, toleransi, gotong royong, dan solidaritas, sementara stereotip, diskriminasi, dan intoleransi masih menjadi tantangan yang penyebabnya bersifat berlapis, termasuk ketidakadilan struktural. Ketiga, kehidupan sosial-keagamaan menunjukkan tren kerukunan yang membaik, ditandai naiknya IKUB menjadi 77,89 pada 2025, meskipun kebersamaan lintas komunitas masih perlu diperkuat.

Keempat, pendidikan multikultural dan moderasi beragama saling melengkapi. Pendidikan multikultural menumbuhkan sikap saling menghargai melalui peran guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat, sedangkan moderasi beragama, dengan indikator komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal, memberi arah sikap beragama yang adil dan tidak ekstrem. Kelima, kehidupan sosial-keagamaan yang harmonis memerlukan penguatan kurikulum dan budaya sekolah, peningkatan kapasitas pendidik, dialog dan kerja sama lintas agama, penghidupan kembali gotong royong dan kearifan lokal, serta kebijakan yang berkeadilan.

Dengan demikian, pendidikan multikultural dan moderasi beragama penting dipandang sebagai kebutuhan bersama, bukan sekadar program pemerintah atau pelajaran di kelas. Keduanya membantu kita menjadikan keragaman sebagai kekuatan bangsa. Penelitian berikutnya disarankan menambahkan data lapangan, misalnya studi kasus di sekolah atau komunitas tertentu, untuk melihat efektivitas penerapan kedua pendekatan ini secara lebih konkret.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA. (2024). Kemendikbudristek validasi 718 bahasa daerah. *ANTARA News*. https://www.antaranews.com/berita/4000737/kemendikbudristek-validasi-718-bahasa-daerah

Banks, J. A. (2019). *An introduction to multicultural education* (6th ed.). Pearson.

Buddha, D. J. B. M. (2025). *Indeks Kerukunan Umat Beragama naik, tertinggi dalam 11 tahun*. Kementerian Agama RI. https://bimasbuddha.kemenag.go.id/indeks-kerukunan-umat-beragama-naik-tertinggi-dalam-11-tahun-berita-1754.html

Hakim, A. R., & Darojat, J. (2023). Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan identitas nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *8*(3), 1337–1346. https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1470

Khoerunisa, S., & Yuliani, S. (2024). The urgency of religious moderation amid Indonesia's diversity. *Jurnal Indonesia Studi Moderasi Beragama*, *1*(2), 77–85. https://doi.org/10.64420/jismb.v1i2.207

Khoerunisa, S., & Yuliani, S. (2025). The emergence of religious moderation in Indonesia's multicultural society. *Jurnal Indonesia Studi Moderasi Beragama*, *2*(2), 78–89. https://doi.org/10.64420/jismb.v2i2.314

Maunah, B., Habibi, M. A., & Pratiwi, E. Z. (2024). Fostering diversity and moderation through multicultural education: Insights from Pesantren Ulul Albab Yogyakarta. *Didaktika Religia*, *12*(2), 387–413. https://doi.org/10.30762/didaktika.v12i2.3518

Mukhibat, M., Istiqomah, A. N., & Hidayah, N. (2023). Pendidikan moderasi beragama di Indonesia (Wacana dan kebijakan). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, *4*(1), 73–88. https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133

Nofrianti, Y., Syamsir, S., Amanda, N., Salsabila, T., Alghiffari, H., Yudanur, R. M. Z., & Syahputra, M. A. (2024). Konflik dan integrasi sosial dalam masyarakat multikultural di Indonesia: Sebuah studi literatur. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, *2*(7), 161–171. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1736

Qomaruddin, Q., Lailiyah, A. F., Maulidah, A. I., & Hasanah, U. (2026). Implementasi kebijakan

.

pendidikan multikultural dalam membangun toleransi. *Quantum Edukatif: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *3*(1), 34–40. https://synergizejournal.org/index.php/QE/article/view/237

RI, K. A. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

RI, K. A. (2024). *Kerukunan beragama menguat, Menag: Indeks KUB capai 76,47 di 2024*. https://kemenag.go.id/nasional/kerukunan-beragama-menguat-menag-indeks-kub-capai-76-47-di-2024-wWHYl

Sipuan, S., Warsah, I., Amin, A., & Adisel, A. (2022). Pendekatan pendidikan multikultural. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, *8*(2), 815–830. https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.815-830.2022

Wahid, A. (2024). Moderasi beragama dalam perspektif pendidikan agama Islam: Implementasi dalam pendidikan multikultural di Indonesia. *Scholars: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, *2*(1), 29–36. https://doi.org/10.31959/js.v2i1.2367